

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN BERBASIS WEB DALAM MENUNJANG KINERJA KELURAHAN DUREN TIGA DI KECAMATAN PANCORAN

Dwi Ratnasari¹, Dodi Rahmat Setiawan^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : nieraa.4ever@gmail.com¹, dodi.rs2303@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Web Based Financial System,
Performance

Duren Tiga Village, Pancoran District, South Jakarta Administrative City is a Regional Performance Unit (SKPD) of DKI Jakarta Province. The method used in this study is a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by observation, interview and documentation techniques. The research informants were 1 (one) Secretary of Duren Tiga Village, 1 (one) Head of Duren Tiga Village Section, 1 (one) Treasurer of Duren Tiga Village, 1 (one) Non ASN / Honorary Staff and 1 (one) Academic. The results of the study show that (1) The implementation of the Web-Based Financial System in Duren Tiga Village is very influential on employee performance. (2) Constraints found in implementing a web-based financial system in Duren Tiga Village are Internet Network Connection, Error System and Employee Performance (3) Efforts made to deal with obstacles found in the Duren Tiga Village Financial System Implementation are the provision of facilities adequate, smooth internet network connection and good employee cooperation and coordination.

PENDAHULUAN

Posisi wilayah strategis menjadikan Jakarta sebagai pusat penggerak roda perekonomian dan perkembangan teknologi, globalisasi serta era demokratisasi dan menjadikan masyarakatnya semakin cerdas menuntut adanya keterbukaan informasi atas pengelolaan keuangan daerah. Atas kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menjadi sorotan masyarakat nasional atas indikasi adanya berbagai praktik korupsi atas penyelewengan keuangan pemerintah daerah. Indikasi atas kerugian daerah tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen pembayaran yang dipakai dalam melakukan pembayaran atas Belanja Daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil evaluasi audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta merupakan cara dalam mengukur akuntabilitas keuangan suatu Pemerintahan dan dapat dikatakan evaluasi audit atas LKPD DKI masih kurang baik. Dapat diketahui dari tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 opini BPK atas tata kelola keuangan daerah menghasilkan jawaban Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu perbaikan dalam sistem pengendalian internal atas tata kelola keuangan daerahnya dan yang sesuai dengan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebutuhan yang menuntut untuk memproses data dengan cepat, maka perlu adanya peningkatan performa sistem dengan pengembangan sistem. Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Masih buruknya sistem pengendalian internal dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti pengelolaan belanja daerah belum memadai, diantaranya masih dijumpai indikasi kelebihan pembayaran yang berdampak pada indikasi kerugian daerah, hasil pengadaan belanja barang tidak digunakan, serta catatan belanja daerah tidak didukung bukti pertanggungjawaban secara lengkap yang kesemuanya terlihat dari penilaian dari BPK terhadap LKPD DKI Jakarta, adanya tuntutan atas Reformasi Keuangan Negara serta, adanya MOU GNNT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Indonesia serta terbitnya Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan permasalahan yang ada sebagai tindak lanjut atas upaya pelaksanaan transaksi non tunai. Dalam mengatasinya tata kelola keuangan daerah yang baik sangatlah dibutuhkan di Provinsi DKI Jakarta.

Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Instruksi Gubernur DKI Jakarta atas pelaksanaan Sistem Keuangan Berbasis Web tersebut mampu membuat tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip Good Governance yang akuntabel, transparan dan berdasarkan landasan hukum (rule of law). Berdasarkan pokok rumusan masalah tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi good governance tentang pelaksanaan pembayaran Sistem Keuangan Berbasis Web pada tata kelola keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta apakah pelaksanaan system tersebut di Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah dikelola berdasarkan tata kelola keuangan yang baik, jika belum, mengapa. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) dimana dalam transaksi tersebut adalah unsur dari penggunaan sistem keuangan berbasis web yang mampu menciptakan good governance dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Duren Tiga dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berbasis web dari tahun 2016 – 2017 mengalami peningkatan (belum tercapai realisasi target) namun tidak signifikan karena birokrasi sistem yang tidak jelas dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang belum sistematis. Dilihat dari tahun 2017 ke 2018 sudah mengalami peningkatan penyerapan anggaran dikarenakan adanya sumber daya yang mulai baik namun tetap adanya kendala dalam sistem penyerapan yang menghambat. Berdasarkan data yang diterima, terlihat bahwa dari tahun 2016, 2017 dan 2018 penyerapan anggaran belum tercapai. Dapat terlihat kenaikan prosentase penyerapan anggaran dalam setiap tahunnya sehingga mempunyai dampak yang berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawainya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Pelaksanaan Sistem Keuangan Berbasis Web Menunjang Kinerja Kelurahan Duren Tiga di Kecamatan Pancoran”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik : Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik administrasi pembangunan pemerintahan daerah dan *good governance*. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak.
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) : Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan : Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sistem akuntansi yang melalui proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Pasal 70: ayat 1). Dengan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.
3. Kinerja : Pengertian Kinerja menurut Mangkunegara, Anwar Prabu, kinerja diartikan sebagai : Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Nawawi. H. Hadari, yang dimaksud dengan kinerja adalah : "Hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/nonmental. Pengertian Kinerja, Definisi Teori, Pengukuran dan Penilaian Sementara itu menurut Bernaden dan Russel, sebagaimana dikutip oleh Gomes, Faustino Cardoso (2000). Kinerja diartikan sebagai : "Cacatan outcome yang dihasilkan dari fungsi fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan karyawan selama suatu periode waktu tertentu.
4. Anggaran : Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (planning). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik. Sebelum membahas tentang anggaran secara mendalam, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian anggaran itu sendiri. Menurut Munandar (2007:11), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang”.

Kerangka Pemikiran

Dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam melaksanakan Sistem Pengelolaan Keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga demi kelancaran penyerapan target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem keuangan berbasis web artinya penggunaan sistem dalam proses penginputan dan pencairan anggaran.
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan suatu sistem yang digunakan dalam pelaksanaan proses keuangan berbasis web.
3. Kinerja Kelurahan Duren Tiga akan menjalankan pekerjaannya dengan profesional yang didukung oleh sumber daya manusia yang baik serta mengikuti perkembangan jaman.
4. Penyerapan anggaran untuk mendapatkan tunjangan kinerja pegawai yang diartikan bahwa penyerapan anggaran yang mencapai penyerapan sebagai dasar pendapatan tunjangan pegawai.

Dengan dikembangkan teori diatas dalam pelaksanaan sistem keuangan berbasis web agar realisasi penyerapan anggaran untuk mendapatkan nilai tunjangan kinerja pegawai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat pertanyaan mengenai bagaimana (how) dan mengapa (why). Kecenderungan dalam studi kasus ini adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, dan mengapa keputusan tersebut diambil, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah hasilnya. Alasan digunakannya jenis penelitian studi kasus adalah karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif, dimana metode kualitatif ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun studi komparasi. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah bagaimana Analisis Sistem Keuangan Berbasis Web Menunjang Kinerja Kelurahan Duren Tiga.

Penelitian ini lebih menekankan pada observasi dan suasana alamiah (natural Setting), yakni mencari teori dan bukan menguji teori, heuristic dan verifikasi. Untuk mendapatkan data yang akurat dan riil, peneliti sendiri yang langsung ke lapangan (participant observasi). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan merekam seluruh kronologis dan kejadian yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan dokumen resmi yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Keuangan Berbasis Web (SIPKD) dalam menunjang kinerja Kelurahan Duren Tiga

1. Tata Cara Pelaksanaan

Tentang tata cara pelaksanaan sistem keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu melalui <https://sipkddki.jakarta.go.id> yang dimana terdapat buku petunjuk serta modul cara penggunaan sistem. Alur proses pelaksanaan sistem keuangan berbasis web sendiri dimana masing-masing SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta yakni Kelurahan Duren Tiga diberikan user dan password untuk melakukan akses proses penginputan sistem. Dimana yang diinput adalah pengajuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target serapan anggaran yang ditentukan oleh Kelurahan Duren Tiga itu sendiri.

2. Faktor pendukung

a. Sumber Daya Manusia

Penerapan sistem keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan didukung oleh beberapa komponen, yaitu : sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya, peningkatan kemampuan/keterampilan SDM dapat dilakukan melalui bimbingan teknis (BimTek) yang teratur dan rutin dilaksanakan.

b. Koneksi Jaringan/Internet

Selain sumber daya manusia yang handal, faktor pendukung yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistem keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga adalah masalah sumber daya hardware maupun software. Dimana penggunaan sebuah sistem tidak lepas dari sumber daya tersebut dalam hali ini yang dimaksudkan adalah Jaringan/Internet sebagai factor utama menjalankan sebuah sistem mengingat sekarang ini proses kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah by sistem. Sehingga sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai harus bias dipenuhi oleh Kelurahan Duren Tiga demi kelancaran penggunaan sistem.

c. Komunikasi

Komunikasi aktif dalam penerapan sistem keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga sangat diperlukan demi kelancaran proses. Baik komunikasi antar pegawai Kelurahan sendiri dan instansi yang berada diatas Kelurahan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan sistem. Sebab dengan adanya komunikasi yang baik diharapkan memprmudah koordinasi dalam proses pelaksanaan sistem keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3. Kendala / hambatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas, terdapat banyak sekali hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem keuangan berbasis web yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal yang dialami yaitu :

- a. Sistem sedang maintenance/under construction.
- b. Jaringan Internet yang bermasalah.
- c. Komputer/PC yang hang.
- d. Kurang teliti pada saat proses penginputan kedalam.

Untuk faktor eksternal sendiri antara lain :

- a. SPJ dari PPTK/Kasi yang kurang lengkap.
- b. Laporan dari masyarakat yaitu RT/RW, FKDM, LMK yang tidak ontime.
- c. Pihak Ketiga/Rekanan yang lamban.

Dimana dari faktor-faktor tersebut dapat menjadi hambatan pada proses pelaksanaan sistem keuangan berbasis web yang mengakibatkan belum tercapainya realisasi dalam waktu yang ditentukan. Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Duren Tiga dalam mengatasi hambatan/kendala tersebut adalah menyediakan ruang khusus yang digunakan untuk pelaksanaan sistem keuangan berbasis web yaitu ruang bendahara dimana didalamnya terdapat Komputer/PC yang tersambung khusus dari jaringan Dinas kominfo Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pada saat proses tersebut tidak mengalami gangguan yang dapat menghambat lancarnya sistem keuangan berbasis web. Selain itu upaya yang dilakukan adalah sering mengadakan koordinasi dan sosialisasi pegawai Kelurahan Duren Tiga untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi sehingga masalah tersebut dapat ditangani segera.

Kinerja

1. Kontribusi Pegawai

Peran aktif pegawai Kelurahan Duren Tiga sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan sistem keuangan berbasis web. Sebab, tanpa adanya peran aktif serta kontribusi pegawai bias mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan sistem yang dampaknya akan dirakan oleh semua baik masyarakat ataupun pegawai itu sendiri. Peran serta kontribusi pegawai yang kurang maksimal akan berpengaruh pada kinerja yang akan mereka sendiri rasakan karena hal tersebut berhubungan dengan proses pembayaran tunjangan kinerja yang diberikan seperti halnya yang telah disampaikan oleh para informan.

2. Tolak ukur keberhasilan kinerja

Dalam sebuah organisasi untuk pasti memiliki tolak ukur kinerja untuk mengetahui keberhasilan sesuai dengan aturan atau target yang ditentukan. Dalam hal ini seperti informasi yang telah didapat tolak ukur keberhasilan dapat dilihat dari pelaksanaan sistem berbasis web yang telah dicapai melalui penyerapan anggaran yang memenuhi target/SPS yang telah dibuat sendiri oleh Kelurahan Duren Tiga dalam tiap bulannya.

Penyerapan Anggaran

1. Faktor yang mempengaruhi penyerapan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara seperti yang dipaparkan diatas, diketahui faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kelurahan Duren Tiga adalah :

- a. Faktor sumber daya manusia baik ketrampilan dan keahlian.
- b. Faktor dokumen perencanaan/SPS yang telah dibuat
- c. Faktor pengetahuan tentang anggaran
- d. Factor prosedur perencanaan anggaran
- e. faktor data
- f. faktor informasi yang valid dan mutakhir
- g. faktor deskripsi kerja

Dimana faktor-faktor tersebut diatas sebisa mungkin Kelurahan Duren Tiga dapat mengatasinya demi kelancaran dan pencapaian target sehingga penyerapan anggaran dapat optimal. Upaya yang dilakukan oleh Lurah duren Tiga agar penyerapan dapat tercapai antara lain ; Sering mengadakan koordinasi dan sosialisasi bagi pegawai untuk mendanyakan hamtan serta kendala yang dialami, memberikan motivasi kerja sama yang kuat antar pegawai agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, koordinasi dengan instansi diatas langsung mengenai proses pelaksanaan sistem keuangan berbasis web untuk proses penyerapan anggaran.

2. Pembayaran tunjangan kinerja

Mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di Kelurahan Duren Tiga mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Absensi kehadiran pegawai
- b. Aktifitas input kinerja Pegawai.
- c. Penilaian Kinerja .
- d. Target anggaran/SPS yang dilakukukan melalui proses pelaksanaan sistem keuangan berbasis web.

Dengan adanya pembayaran tunjangan kinerja tersebut diharapkan menjadi motivasi para pegawai dalam melaksanakan program kerja baik dalam pelaksanaan sistem keuangan berbasis web maupun kinerja yang lain sehingga dapat mencapai target penyerapan anggaran yang sudah dirancang.

Dari hasil wawancara dari semua Informan sangat jelas disebutkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan berbasis web mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran tunjangan. Apabila pegawai tidak dapat mencapai target yang ditentukan, maka efek yang dirasakan sangat jelas pada jumlah tunjangan yang mereka peroleh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan berbasis web yang menunjang kinerja Kelurahan Duren Tiga di Kecamatan Pancoran, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sistem keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga berjalan dengan baik untuk menjamin konsistensi kinerja pegawai dalam menyajikan data, pengolahan data maupun pelaporan keuangan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan dalam rangka pencapaian target realisasi anggaran.

2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan sistem keuangan berbasis web yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya dapat terjadi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem dimana induk dari sistem keuangan berbasis web yang digunakan oleh Kelurahan Duren Tiga adalah sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik berupa koneksi jaringan internet ataupun maintenance sistem. Faktor internal dipengaruhi oleh kinerja Kelurahan Duren Tiga sendiri baik dalam proses penginputan dalam sistem maupun pelaksanaan sistem yang dijadikan sebagai acuan kinerja.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan sistem keuangan berbasis web di Kelurahan Duren Tiga yaitu menyediakan sarana dan prasarana sistem seperti : Ruang Khusu, Komputer/PC, Jaringan Internet serta menjalin komunikasi yang aktif antar pegawai dan bekerja sama dalam proses pelaksanaan sistem serta Lurah selaku kepala pimpinan Kelurahan Duren Tiga memfasilitasi sarana prasarana dengan baik agar proses pelaksanaan sistem keuangan berbasis web dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung : Bandung Pustaka Setia.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Siagian, Sondang P.2004.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta:Bumi Aksara

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Suharsimi. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta

Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku. 1. Jakarta : Salemba Empat.

Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

Arfan Ikhsan. (2009). *Pengantar Praktis Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Munandar, M. 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja. Pengawasan Kerja. Edisi Kedua. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta*

Jurnal :

Mantu,Hastuti 2013.*Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo*. Skripsi Program Studi Strata 1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.hlm.11

Lintong, Diana Nova, David Paul Elia Saerang, Ventje Ilat .2017.*Pengaruh Implementasi sistem akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Pemerintah Kotamabagu*.Jurnal Accountability.Vol 06,No.1.2017.hlm.118-127.

Utari,Nikesari Puji.2016.*Analisis Perubahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.Jur.Ilm.Adm.Negara.Univ.Indonesia,Mei 2016.hlm. 16.

Rahmawati,Rika.2018.*Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai Berbasis Web pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara*,Jur.Sis.Informasi,Univ.Islam Negeri Alauddin Makasar,April 2018.hlm. 123-130.

Pirade,Dominggus, A. Karim Saleh, Muhammad Yunus Amar .2017.*Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai di Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Accountability.Vol 06,No.1.2017, September2017,hal.76-82.

Peraturan – peraturan :

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kelurahan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah